

Susanti

*Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara*

## **Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara**

**Susanti**

### **ABSTRACT**

This research aim to analyze the impact of regional expansion according to the experts and according to peoples on welfare in Lampung Utara Regency as main regency after experiencing three times expansion with Lampung Barat Regency, TulangBawang Regency, and Way Kanan Regency. This research use primary data and secondary data. To view the perceptions of the experts on the impact of regional expansion we use AHP (Analysis Hierarchi Proses). AHP is used to see where the impact of the higher priority of the impacts of existing regional expansion, then compared with the public perception of how the impact of the regional expansion on the welfare.

The results shows that there was a shift after the expansion of economic structure in Lampung Utara Regency, from agriculture to manufacturing industry. This thing inflict the welfare in Lampung Utara Regency has increased. The results of calculation using the AHP shows that the experts argue that the most important impact of the expansion is economic welfare. Meanwhile the public feel that after expansion happen, it turns improving the quality of infrastructure more dominant than the economic welfare.

Key words: The Impact of Regional Expansion, Welfare, Main Regency, Priority

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah menurut pakar dan menurut masyarakat terhadap kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara sebagai Kabupaten induk setelah mengalami tiga kali pemekaran yaitu dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk melihat persepsi pakar mengenai dampak pemekaran wilayah digunakan alat analisis AHP (Analisis Hierarchi Proses), alat ini digunakan untuk melihat dampak mana yang lebih prioritas dari dampak-dampak pemekaran

wilayah yang ada, kemudian dibandingkan dengan persepsi masyarakat bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan.

Hasil penelitian ini menunjukkan setelah pemekaran ada pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Lampung Utara yaitu dari pertanian menjadi industri pengolahan, kesejahteraan Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan. Hasil penghitungan menggunakan alat AHP yaitu para pakar berpendapat bahwa dampak yang paling utama dari pemekaran yaitu kesejahteraan ekonomi. Sementara masyarakat merasakan setelah pemekaran ternyata peningkatan kualitas infrastruktur lebih dominan daripada kesejahteraan ekonomi.

*Kata kunci : Dampak Pemekaran Wilayah, Kesejahteraan, Kabupaten Induk, Prioritas*

## **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas Kabupaten/Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.

Proses pembentukan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah menyatakan bahwa pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan, dan faktor lain

yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat, selain itu dengan adanya pemekaran daerah maka tuntutan akan mutu dari pelayanan yang diberikan pemerintah makin meningkat. Pemekaran daerah dalam arti pembentukan Kabupaten dan Kota, hendaknya juga ditujukan untuk memacu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperpendek jalur birokrasi, memperpendek rentang kendali, juga memberikan kemungkinan terbukanya isolasi-isolasi daerah yang terpencil. Pemekaran daerah merupakan suatu strategi yang dapat dilakukan ketika wilayah pelayanan telah menjadi terlalu luas, sehingga pemerintah tidak bisa optimal melaksanakan tugas-tugasnya termasuk dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat secara baik. Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentkan daerah dapat terwujud. Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran yang pertama dimekarkan dengan Kabupaten Lampung Barat kemudian dengan Kabupaten Tulang bawang dan terakhir dengan Kabupaten Way Kanan. Sesuai dengan tujuan utama dari pemekaran yaitu kesejahteraan baik di kabupaten yang dimekarkan maupun kabupaten induk, salah satu indikator dari kesejahteraan dari suatu daerah adalah tingginya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya angka kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupten ini masih tergolong rendah juga angka kemiskinan yang masih sangat tinggi, Lampung Utara memiliki presentase penduduk miskin tertinggi dibandingkan Kabupaten lainnya bahkan dengan Kabupaten-Kabupaten yang dimekarkan oleh induknya ini meskipun setiap tahunnya angka penduduk miskin mengalami penurunan. Permasalahan utama dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara? Sementara Ruang lingkup penelitian ini mencakup dampak pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Utara setelah pemekaran terakhir yaitu setelah pemekaran dengan Kabupaten Way Kanan.

## **Metodologi**

### **1. Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung dari responden dan informan kunci di lapangan melalui wawancara dan menggunakan pertanyaan/kuisisioner yang terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. Kuisisioner penelitian terdapat pada lampiran 1 dan 2, terdiri dari kuisisioner AHP dan kuisisioner masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan dan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari instansi dan dinas-dinas yang terkait dengan penelitian. BPS, Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah dan hasil penelitian terdahulu. Data setelah pemekaran digunakan data mulai tahun 2000 – 2010. Data sekunder yang dikumpulkan adalah; data PDRB, APBD, gambaran umum daerah penelitian yang meliputi aspek fisik, social, ekonomi, budaya dan data sekunder lainnya yang digunakan sebagai gambaran bagaimana perkembangan Lampung Utara setelah pemekaran di era otonomi daerah

### **2. Metode Pengambilan Sampel**

Metode pengambilan penumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode nonprobability sampling dengan teknik “purposive sampling” dengan pertimbangan responden yang dipilih merupakan pihak yang berperan penting dalam pembangunan daerah baik sebelum dan sesudah pemekaran.

Ada 2 responden yang digunakan dalam penulisan ini yaitu responden masyarakat dan responden pakar, adapun karakteristik responden yang digunakan yaitu :

a. Responden AHP

AHP adalah analisis pakar pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Utara pada penelitian ini pakar yang ditetapkan 5 orang dengan pertimbangan (a).Pendidikan, (b). Pengambil kebijakan di Lampung Utara pada saat pemekaran dengan way kanan (c). Masih berpengaruh di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara sampai saat ini. (d). 5 (lima) orang responden pakar yaitu : 1 orang staf ahli, 1 orang kepala PMD, 1 orang Kepala Bappeda saat ini, 1 orang Kepala Bappeda saat pemekaran dengan Way Kanan, dan 1 orang Kasie Pengembangan wilayah.

b. Responden Masyarakat

Kuisisioner untuk masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah adapun responden nya mempunyai karakteristik sebagai berikut : (a). Pendidikan minimal SLTA (b).Telah berdomisili di ibukota kecamatan, desa tertinggal dan desa maju pada saat pemekaran wilayah sampai dengan saat ini. (c).Keaneka ragaman profesi.(d).46 orang responden tinggal di ibukaota kecamatan (responden perkotaan) dan 92 responden tinggal di desa (responden perdesaan), yang terdiri dari 46 orang responden dari desa tertinggal dan 46 responden dari desa maju

3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data menggunakan metode survey kepada masyarakat dan pakar dengan membagikan lembar kuisisioner untuk kemudian diisi oleh masyarakat maupun pakar.

4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian persepsi pengambil keputusan mengenai dampak pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Utara merujuk pada penelitian UNDP dan Bappenas tahun 2008 tentang dampak pemekaran wilayah dengan variable sebagai berikut :

1. Kinerja Perekonomian Daerah
2. Kinerja Keuangan dan Pembangunan Daerah
3. Kinerja Pelayanan Publik

#### 4. Kinerja Aparatur Pemerintah

variabel penelitian persepsi masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan sesuai pula dengan indikator – indikator yang digunakan UNDP dan Bappenas ini.

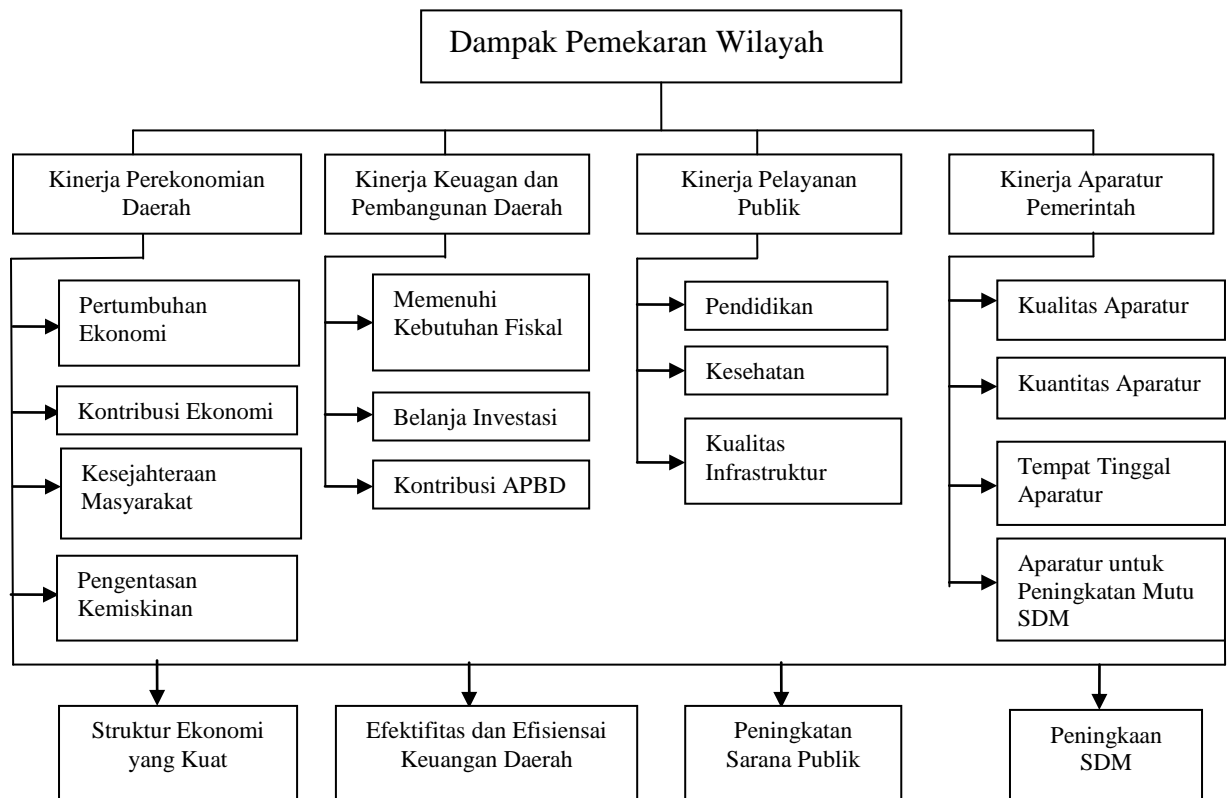
#### 5. Metode Analisis

Dalam penulisan ini menggunakan dua metode analisis yaitu:

##### a. Analisis Hierarki Proses

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan melalui persepsi pakar di Kabupaten Lampung utara. Analisis Hierarchical Process di desain untuk menangkap persepsi orang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang dirancang untuk sampai pada skala prefensi diantara berbagai alternatif.

Gambar 1. Analisis Hirarki Proses untuk Dampak Pemekaran Wilayah



## b. Analisis Deskriptif Persepsi Masyarakat terhadap Kesejahteraan

Untuk melihat persepsi masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat Lampung Utara digunakan analisis deskriptif, untuk mengetahui persepsi masyarakat melalui kuisisioner yang dibagikan sebelumnya dilakukan uji validasi. Uji validasi dalam penelitian ini adalah uji konstruk (construct validity) adalah validasi yang mempertanyakan apakah butir-butir pertanyaan dan instrumen telah sesuai dengan konsep keilmuan yang bersangkutan. Uji validasi sebuah item pertanyaan diukur menggunakan korelasi antara skor pertanyaan tersebut (Xi) dengan total skor tanpa melibatkan pertanyaan yang ingin diperiksa (Y-Xi). Rumus korelasi pearson atau product moment, yaitu :

$$r_{hitung} = \frac{n\sum XZ - (\sum X)(\sum Z)}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Z^2 - (\sum Z)^2)}}$$

Dimana :

r<sub>hitung</sub> = angka korelasi  
 n = Jumlah Responden  
 X = skor pertanyaan yang diuji validasi  
 Z = skor total tanpa melibatkan pertanyaan yang

dikaji (Y-X)

## Hasil Pembahasan

### Perekonomian dan Kesejahteraan

Seperti yang telah dijelaskan berdasarkan data sekunder pada bab sebelumnya bahwa pemekaran Lampung Utara menunjukkan dampak yang positif terlihat pada bab 1 bahwa PDRB Kab LU pada tahun 1995 – 2000 mengalami peningkatan. Pada tabel 1 pada Bab pendahuluan terlihat bahwa setelah pemekaran industri pengolahan tanpa migas mengalami kenaikan yang sangat pesat hal ini menunjukkan bahwa setelah pemekaran Kabupaten Lampung Utara selain didominasi oleh sektor pertanian juga disokong oleh sektor pengolahan tanpa migas, bahkan sektor ini lebih berperan

Tabel 1. Kontribusi Sektor-Sektor PDRB Tahun 1995 – 2000 Sebelum Pemekaran Dengan Way Kanan (dalam persen)

No	Sektor	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Petanian, peternakan, kehutanan & perikanan	44,55	43,49	41,13	44,03	57,58	51,79
2	Penggalian	2,29	2,51	2,80	2,34	1,63	2,09
3	Industri pengolahan tanpa migas	5,48	5,15	100	6,57	3,56	7,46
4	Listrik dan air bersih	0,23	0,24	0,26	0,28	0,17	0,27
5	Bangunan	6,50	7,33	7,42	5,76	4,03	6,45
6	Perdagangan hotel dan restoran	21,63	21,79	22,58	20,62	13,66	13,05
7	Pengangkutan dan komunikasi	3,94	4,05	4,25	4,61	3,63	6,38
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	5,62	6,16	6,70	6,83	3,94	6,38
9	Jasa – jasa	9,77	9,28	9,16	8,97	11,81	6,12

Tabel 2. Kontribusi Sektor-Sektor PDRB Tahun 2000 – 2009 Setelah Pemekaran Dengan Way Kanan (dalam persen)

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Petanian, peternakan, kehutanan & perikanan	55,52	49,94	53,36	51,54	44,98	43,67	43,43	37,97	38,34	37,68
2	Penggalian	0,27	2,13	2,36	2,35	0,37	0,96	0,83	0,84	0,83	0,84
3	Industri pengolahan tanpa migas	8,21	7,42	7,85	7,76	14,79	15,32	15,06	14,95	4,76	14,82
4	Listrik dan air bersih	0,33	0,32	0,33	0,81	0,90	0,79	0,69	0,68	0,67	0,68
5	Bangunan	7,31	6,78	7,33	7,43	5,00	5,21	4,69	4,76	4,78	4,88
6	Perdagangan hotel dan restoran	14,34	13,03	13,69	13,75	19,84	20,19	17,64	17,61	17,39	17,52
7	Pengangkutan dan komunikasi	7,16	6,71	7,11	71,13	5,88	5,78	6,15	6,38	6,56	6,72
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	6,86	13,68	7,99	9,23	8,24	8,07	7,53	7,52	7,50	7,62
9	Jasa – jasa							8,95	9,27	9,16	9,24

Sementara sektor pengolahan tanpa migas terus meningkat sektor pertanian terus mengalami penurunan pada tahun 2001 sebesar 55,52 terus turun hingga pada tahun 2010 menjadi 37,68. Trend pertumbuhan ekonomi ini disebabkan setelah pemekaran potensi-potensi pertanian di Kabupaten Lampung Utara berkurang dikarenakan telah menjadi bagian dari Kabupaten yang dimekarkan sehingga kebijakan pemerintah lebih meningkatkan potensi pengolahan tanpa migas hal ini lalu didukung pula dengan perencanaan daerah yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana arah pembangunan perekonomian Lampung Utara dititik beratkan kepada industri pengolahan tanpa migas dengan output akhir adalah kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yaitu meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setelah pemekaran IPM Kabupaten Lampung Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun jika dibandingkan dengan Kabupaten yang



dimekarkannya yaitu Way Kanan IPM Kabupaten Lampung Utara masih sedikit tertinggal. Hal ini terlihat pada tabel 9 berikut ini :

**Tabel 8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Lampung Utara dibandingkan Kabupaten yang dimekarkannya tahun 2002 – 2010 (dalam persen)**

Kabupaten/ Kota	Tahun								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lampung Barat	63.80	63.90	65.20	65.20	65.90	66.26	66.52	66.83	67.14
Lampung Utara	65.40	65.40	66.70	66.90	67.10	67.36	67.52	67.73	67.94
TulangBawang	64.70	64.90	66.40	67.30	67.80	68.11	68.33	68.59	68.86
Way Kanan	66.30	66.30	67.80	68.50	68.70	68.93	69.07	69.26	69.45

Sumber : BPS 2011

Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari presentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara dibandingkan Kabupaten-Kabupaten yang dimekarkannya masih tertinggi namun angka kemiskinan ini mengalami penurunan setiap tahunnya.

**Tabel 9. Persentase Penduduk Miskin Lampung Utara dibandingkan Kabupaten yang dimekarkannya 2005 - 2011**

No.	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Lampung Barat	23,97	25,36	24,77	21,74	19,13	17.12	15.99
2	Lampung Utara	31,40	32,50	32,16	31,24	28,96	28.19	26.33
3	Way Kanan	27,57	26,18	25,96	22,34	20,92	18.81	17.63
4	Tulangbawang	15,03	13,94	13,03	11,17	10,48	10.80	10.11

Sumber : Susenas, 2012

Penurunan persentase angka kemiskinan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Upaya pemerintah ini diwujudkan melalui program – program, namun program-program ini belum menjadi prioritas dari pemerintah. Kabupaten Lampung Utara memiliki PAD yang memadai untuk melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan ini terlihat dari tingginya PAD Lampung Utara dibandingkan Kabupaten-Kabupaten yang dimekarkannya, terlihat dari tabel 11 berikut ini:

Tabel 10. Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten - Kabupaten yang dimekarkannya (dalam juta rupiah).

Tahun	Lampung Utara	Lampung Barat	Tulang Bawang	Way Kanan
2000	2.205,24	1.344,53		122,55
2001	4.562,01	2.054,02	2.195,50	1.218,34
2002	6.090,06	3.978,84	4.747,95	2.680,22
2003	7.863,21	5.394,42	6.862,72	2.783,45
2004	8.244,67	4.954,46	5.173,97	2.690,18
2005	9.326,42	6.197,94	5.313,91	2.585,98
2006	11.406,40	11.215,89	8.340,17	8.340,17
2007	27.337,84	12.026,21	19.763,70	12.026,21
2008	16.531,83	17.245,47		

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan

PAD Lampung Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya dan angkanya pun tertinggi dibandingkan Kabupaten-Kabupaten lain yang dimekarkannya.

### Hasil Penghitungan AHP

Hasil penelitian ini, atas variabel dan indikator yang digunakan untuk menilai dampak pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Utara, dengan menggunakan metode yang telah dipakai oleh United Nations Development Programs (UNDP) dan Bappenas tahun 2007 untuk menilai dampak pemekaran wilayah di daerah daerah DOB. Variabel-variabel yang mempengaruhi dampak pemekaran wilayah dikelompokkan kedalam 5 (lima) faktor, sebagai berikut: (1).Perekonomian daerah (2). Keuangan dan Pembangunan Daerah, (3) Pelayanan Publik, dan (4). Aparatur Pemerintah

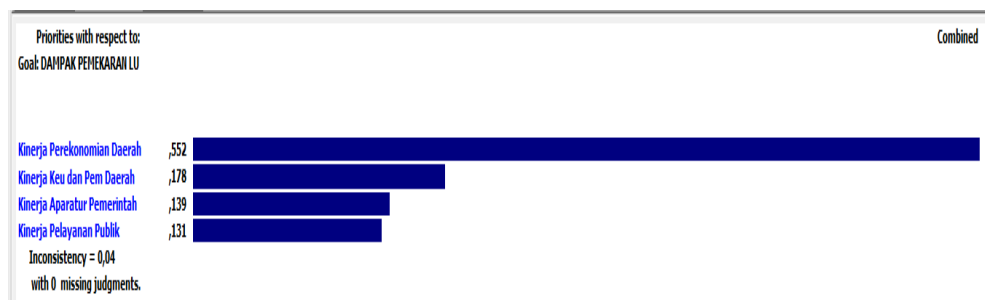
Hasil AHP menunjukkan bahwa dampak dari pemekaran wilayah yang paling utama adalah aspek perekonomian daerah dengan nilai sebesar 0,552. Menurut pakar dampak pemekaran wilayah yang paling utama yaitu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lampung Utara dengan output struktur ekonomi Lampung Utara menjadi kuat. Selanjutnya aspek keuangan dan pembangunan daerah merupakan prioritas selanjutnya dengan nilai sebesar 0,178, output dari aspek ini yaitu Kabupaten Lampung Utara dapat melakukan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Kemudian prioritas selanjutnya adalah aspek kinerja aparatur pemerintah dengan nilai sebesar 0,139 pakar mengharapkan aspek ini dapat meningkatkan kualitas, kuantitas dan peningkatan aparatur untuk SDM

Susanti

*Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara*

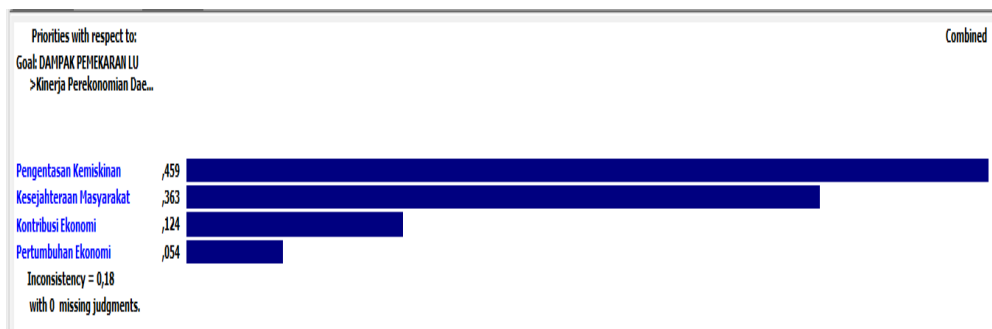
dan output yang diharapkan yaitu meningkatnya SDM dari aparatur di Kabupaten Lampung Utara. selanjutnya aspek pelayanan publik dengan nilai 0,131 dimana aspek ini menurut pakar dapat meningkatkan pendidikan kesehatan dan kualitas infrastruktur, output dari aspek ini yaitu peningkatan sarana publik. AHP dampak pemekaran wilayah terlihat dari gambar 2 berikut ini :

Gambar 2 : AHP untuk Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten Lampung Utara



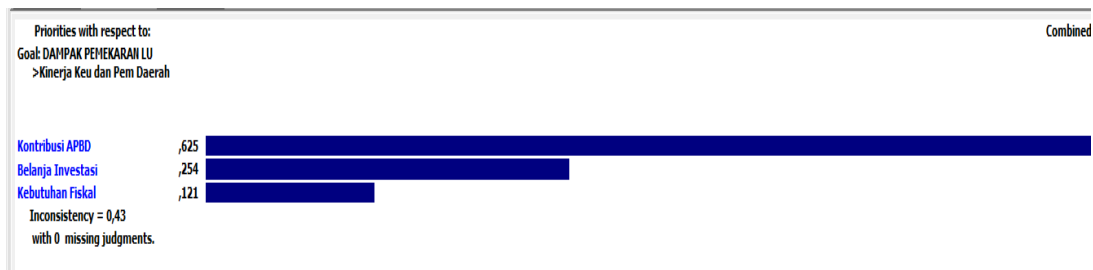
Sementara itu dari aspek kinerja perekonomian daerah kriteria prioritas menurut pakar sebagai dampak dari pemekaran wilayah adalah pengentasan kemiskinan dengan nilai sebesar 0,459, ini berarti untuk mewujudkan perekonomian daerah hal yang paling utama adalah pengentasan kemiskinan diikuti oleh kesejahteraan masyarakat nilainya 0,363, kriteria kesejahteraan masyarakat akan mengikuti apabila angka kemiskinan telah menurun. Kriteria selanjutnya adalah kontribusi ekonomi dengan nilai 0,124 serta pertumbuhan ekonomi dengan nilai 0,054 hal ini menunjukkan bahwa para pakar mengharapkan setelah pemekaran angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara mengalami penurunan. Urutan prioritas perekonomian daerah dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini :

Gambar 3. Prioritas perekonomian daerah



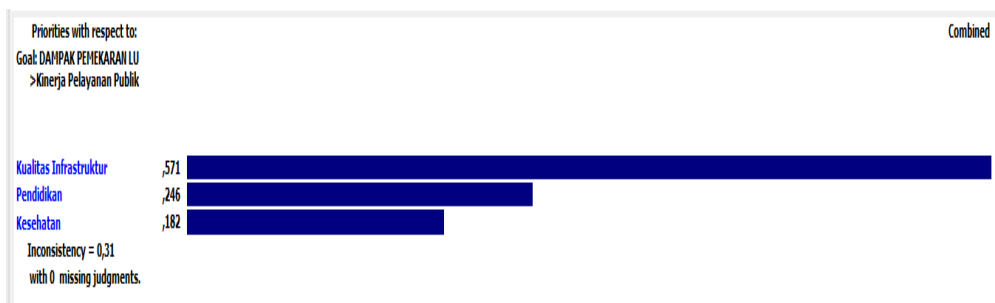
Aspek lainnya yang merupakan dampak dari pemekaran wilayah yaitu aspek keuangan dan pembangunan daerah, adapun kriteria yang menjadi prioritas menurut pakar sebagai dampak dari pemekaran wilayah adalah kebutuhan fiskal dengan nilai sebesar 0,121 diikuti oleh belanja investasi nilainya 0,254 dan kontribusi APBD dengan nilai 0,625. Hal ini menunjukkan bahwa menurut para pakar setelah pemekaran kebutuhan fiskal di Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada gambar 4 berikut ini :

Gambar 4. Kinerja Keuangan dan Pembangunan Daerah



Aspek selanjutnya adalah aspek pelayanan publik yang merupakan dampak dari pemekaran wilayah, kriteria utama dari aspek ini adalah kualitas infrastruktur dengan nilai sebesar 0,571 diikuti oleh pendidikan nilainya 0,246 dan kesehatan dengan nilai 0,182 hal ini menunjukkan bahwa para pakar mengharapkan setelah pemekaran kualitas infrastruktur Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan. Gambar 5 Berikut adalah Prioritas Pelayanan Publik

Gambar 5. Prioritas pelayanan public



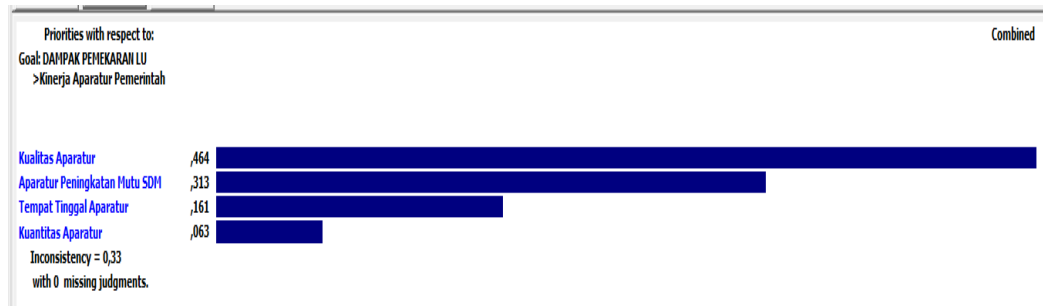
Aspek kinerja aparatur kriteria yang diharapkan pakar sebagai dampak dari pemekaran wilayah adalah kualitas aparatur dengan nilai sebesar 0,464 diikuti

Susanti

*Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara*

oleh kinerja aparatur untuk peningkatan SDM nilainya 0,313 dan tempat tinggal aparatur dengan nilai 0,161 serta kuantitas aparatur dengan nilai 0,063 hal ini menunjukkan bahwa para pakar mengharapkan setelah pemekaran kualitas aparatur semakin meningkat.

Gambar 6. Prioritas kinerja aparatur



### Hasil Penelitian Terhadap Masyarakat

Kuisisioner yang dibagikan kepada masyarakat dengan total responden 138 orang yang terdiri dari 46 orang responden perkotaan (responden berada di ibukota kecamatan) 46 orang responden daerah tertinggal (desa tertinggal) dan 46 orang di desa tidak tertinggal, survey ini bertujuan membandingkan persepsi masyarakat dengan persepsi pakar mengenai dampak pemekaran

### Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Infrastruktur

Setelah dilakukan survey kepada masyarakat yang berada di perkotaan maupun di pedesaan di Kabupaten Lampung Utara peneliti mendapatkan bahwa rata-rata jawaban dari masyarakat adalah kinerja infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara meningkat. Hampir keseluruhan dari masyarakat perkotaan merasakan peningkatan kinerja infrastruktur mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas jalan yang semakin baik, fasilitas pasar dan fasilitas transportasi. 4,34 persen dari masyarakat perkotaan mengatakan fasilitas air bersih tidak ada perubahan karena sampai dengan saat ini mereka tidak mendapatkan fasilitas air bersih yang disediakan pemerintah berupa saluran PDAM, namun hal ini tidak menjadi masalah karena kondisi air tanah yang mereka gunakan saat ini kualitasnya sangat baik.

Demikian halnya dengan masyarakat di desa tidak tertinggal mereka merasakan fasilitas pendidikan semakin baik, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pasar serta fasilitas transportasi juga semakin baik. 6,52 persen dari masyarakat di desa tidak tertinggal mengatakan bahwa fasilitas jalan tidak ada perubahan karena jalan telah banyak yang kembali rusak dan lama diperbaiki walaupun sebelumnya telah mengalami peningkatan, 10,87 persen masyarakat ini mengatakan fasilitas air bersih pun tidak mengalami perubahan dikarenakan saluran air bersih tidak mencapai tempat mereka dan inipun tidak menjadi masalah bagi mereka dikarenakan sumber air tanah kualitasnya sangat baik.

Masyarakat yang berada di desa tertinggalpun mengatakan bahwa kinerja infrastruktur meningkat mereka merasakan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas transportasi meningkat. 10,87 persen dari masyarakat di desa tertinggal dengan alasan yang sama dengan masyarakat di desa tidak tertinggal dan di perkotaan mengatakan bahwa fasilitas air bersih tidak ada perubahan, 4,34 persen masyarakat ini mengatakan bahwa fasilitas jalan tidak ada perubahan dikarenakan banyak jalan yang telah rusak kembali dan 6,52 persen masyarakat mengatakan bahwa fasilitas pasar tidak mengalami perubahan dikarenakan mereka tetap menjalankan aktifitas pasar seperti biasa yaitu berpindah pindah dari satu desa ke desa lainnya dengan peralatan seadanya.

### **Persepsi Mengenai Kinerja Aparatur**

Hasil survey yang dilakukan kepada masyarakat kota masyarakat di desa tertinggal maupun desa tidak tertinggal menunjukkan bahwa kinerja aparatur mengalami peningkatan. Masyarakat perkotaan merasakan usulan pembangunan desa semakin mudah terealisasi, pengurusan administrasi semakin mudah dan cepat, mendapatkan perizinan menjadi semakin mudah dan jalur birokrasi yang pendek tidak berbelit - belit namun 10,87 persen dari responden mengatakan bahwa untuk pembuatan SIUP masih relatif lama dan IMB prosesnya dan masih berbiaya, manfaat pengobatan gratis dan program pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan terasa meningkat, juga partisipasi masyarakat dalam mengkritisi kinerja pemerintah semakin meningkat dengan transparansi dari pemerintah terhadap masyarakat dan media - media cetak dan elektronik yang semakin berkembang.

Masyarakat desa tidak tertinggalpun merasakan hal yang sama di bidang peningkatan kinerja aparatur, masyarakat meraskan dalam menjalankan tugasnya aparat bekerja semakin meningkat sehingga terasa pada meningkatnya realisasi-realisisasi dari pembangunan desa yang mereka usulkan, dalam mendapatkan perizinan semakin mudah meskipun 6,52 persen dari masyarakat yang diwakilkan oleh responden mengatakan bahwa pembuatan SIUP masih lama dalam pembuatan dan IMB masih berbiaya, program pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan semakin terasa dengan pelayanan aparatur yang semakin baik, terbuka dan transparan nya pemerintah semakin meningkat terhadap masyarakat dan media-media massa. Namun untuk pelayanan pemerintah dalam pengurusan administrasi terdapat 4,34 persen dari responden mengatakan menurun hal ini menyangkut kebijakan dimana sebelumnya dalam pembuatan KTP cukup dilakukan di RT setempat namun pada saat ini diharuskan di ibukota kecamatan.

Ada kesamaan hasil survey mengenai dampak pemekaran daerah terhadap kinerja aparatur yang dilakukan terhadap masyarakat di desa tertinggal. Masyarakat desa tertinggalpun merasakan kinerja aparatur meningkat yang tergambar dari realisasi pembangunan desa yang meningkat, demikian pula dengan program-program di bidang kesehatan dan pendidikan partisipasi masyarakat dalam mengkritisi aparat semakin terbuka dan meningkat. Seperti halnya masyarakat di desa tidak tertinggal 10,87 pesen masyarakat di desa tertinggalpun merasakan pengurusan administrasi KTP menurun dikarenakan harus dilakukan di ibukaota kecamatan berbeda dengan sebelumnya yang cukup di lakukan di kelurahan bahkan di RT setempat, selain itu dalam mendapatkan perizinan, 6,52 persen masyarakat desa tertinggal merasakan tidak ada perubahan hal ini mereka contohkan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pengurusannya tidak semakin mudah dan masih berbiaya juga kurangnya sosialisasi dari aparat mengenai pentingnya IMB sehingga masyarakat banyak yang malas untuk mengurusnya dan kebanyakan yang mengurus apabila mereka ingin mengajukan pinjaman ke bank atau koperasi sebagai salah satu persyaratan

### **Persepsi Masyarakat Mengenai Perekonomian dan Kesejahteraan**

Survey pada masyarakat perkotaan, desa tidak tertinggal dan desa tertinggal juga dilakukan pada aspek perekonomian dan kesejahteraan dengan responden

yang sama, hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan merasakan peningkatan pada kesejahteraan mereka. Mereka merasakan lowongan pekerjaan meningkat, kesempatan berwirausaha semakin meningkat keadaan pendapatan mereka meningkat begitu pula dengan kesejahteraan. Namun 6,52 persen dari masyarakat merasakan tidak ada perubahan dalam manfaat program-program pemberantasan kemiskinan, bahkan mereka merasakan sangat kurang sekali program-program tersebut yang milik pemerintah daerah, sebab program yang sudah banyak berjalan adalah kebijakan pemerintah pusat.

Masyarakat desa tidak teringgal juga merasakan perekonomian meningkat dan kesejahteraan mereka yang membaik, kesempatan berwirausaha meningkat pendapatan meningkat dan kesejahteraan mereka meningkat, 2,1 persen dari responden mengatakan bahwa tidak ada perubahan pada lowongan pekerjaan di desa tidak teringgal mereka mengatakan tidak ada perubahan sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran. 15,21 persen dari masyarakat juga merasakan tidak ada perubahan pada program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah daerah untuk menambah program-program yang selama ini sudah ada dari pemerintah pusat seperti BLSM, PNPM, dan PKH.

Masyarakat desa teringgal juga merasakan peningkatan kesejahteraan setelah pemekaran, kesempatan berwirausaha semakin membaik yang berdampak pada pendapatan juga kesejahteraan mereka. Sebanyak 10,87 persen dari responden mengatakan bahwa tidak ada perubahan pada pada lowongan pekerjaan dan 15,21 masyarakat merasakan program-program pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan dirasakan tidak ada perubahan.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan :**

- a. Setelah pemekaran ada pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Lampung Utara yaitu dari pertanian menjadi industri pengolahan, hal ini dikarenakan potensi pertanian yang banyak menjadi daerah lain setelah pemekaran.
- b. Kesejahteraan Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan terlihat dari meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten yang dimekarkannya, sementara angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara masih tertinggi walaupun setiap



## Susanti

### *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara*

tahunnya mengalami penurunan, demikian pula dengan nilai IPM yang masih lebih rendah dari salah satu daerah yang dimekarkannya yaitu Kabupaten Way Kanan

- c. Para pakar berpendapat bahwa dampak yang paling utama dari pemekaran yaitu kesejahteraan ekonomi hal ini dikarenakan luas daerah yang semakin sempit, rentang kendali yang semakin pendek membuat daerah itu semakin sedikit daerah yang diurusnya dengan anggaran yang tidak berkurang dibandingkan sebelum pemekaran. Kemudian prioritas selanjutnya dari dampak pemekaran wilayah pakar mengharapkan peningkatan kualitas aparatur lalu peningkatan kualitas infrastruktur.
- d. Sementara masyarakat merasakan setelah pemekaran ternyata peningkatan kualitas infrastruktur lebih dominan daripada kesejahteraan ekonomi lalu peningkatan kualitas aparatur. Hal ini dikarenakan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara lebih kepada peningkatan infrastruktur dibandingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan kualitas aparatur. Pemerintah lebih mengutamakan pembangunan fisik daripada program-program yang mensejahterakan masyarakat maupun peningkatan kualitas aparatur .

## Saran

Untuk mewujudkan struktur ekonomi yang kuat pemerintah harus lebih mengoptimalkan sektor pengolahan tanpa migas selain sektor pertanian agar daerah ini lebih sejahtera, juga agar kedepan pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memprioritaskan pembangunan Kabupaten Lampung Utara ke arah kesejahteraan masyarakat. Mengutamakan dan lebih meningkatkan juga memperbanyak program-program ke arah kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan sehingga Kabupaten Lampung Utara tidak tertinggal dibandingkan Kabupaten lainnya dan dapat mengejar ketinggalannya dengan Kabupaten lainnya karena Kabupaten Lampung Utara sampai saat ini merupakan Kabupaten termiskin dari keseluruhan kabupaten dan kota di provinsi Lampung. Untuk mendukung tujuan utama dari pemekaran harus didukung dengan aparatur yang berkualitas yang mampu merencanakan melaksanakan tujuan utama pemekaran tersebut kemudian harus pula didukung dengan sarana infrastruktur yang baik.

## Daftar Pustaka

- Abe,A.2002. *Perencanaan Daeah Partisifatif*. Pondok Edukasi, Solo.
- Afriani Inda, dkk.2012. *Dampak Pemekaran Kabupaten Tana Toraja terhadap Kinerja Perekonomian, Keuangan, Pelayanan Publik dan Aparatur Pemerintah Daerah*.
- Bappenas dan UNDP. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah*.  
[http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran\\_id.pdf](http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran_id.pdf). 2013
- Furry P.R dan Sasana.H. 2013. *Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Serang*. Diponegoro Journal of Economics. Volume 2 Nomor 3 Hal. 1 – 73 ISSN (online) : 2337-3814, 2013
- Hermantyo. 2007. *Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia* Jurnal Sains Vol II No 1. April 2007.
- Juanda, B. 2006. *Dampak Pemekaran Terhadap APBN dan Kinerja Perekonomian Daerah*. Jakarta
- LUDA, 2011. Bappeda
- Malia Rosda. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Studi Kasus di Kota Cimahi Jawa Barat*. Tesis IPB
- Manan 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Penerbit Pusat Studi Hukum
- Osborne dan Geabler 1996 *Peiveting Government (Mewirousahakan Birokrasi)* Edisi Terjemahan. PPM Jakarta
- Pattilima, H. 2005, *Metode Kualitatif*. Bandung
- Riadi dan Bratakusumah D.S, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Riani dan Pudjihardjo.M. 2012. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan per kapita, kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah*. Jurnal Bumi Lestari, Vol 12 No.1 hal. 137 – 148 Februari 2012.
- Saefulhakim. 2005. *Modul Pratikum Permodelan*. IPB
- Saaty Thomas L. 1991. *Pengambilan Keputusan (Bagi Para Pemimpin)*. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta
- Setiawan Simanjuntak.RA. 2003 *Implementasi Desentralisasi Fiskal Problema, Prospek dan Kebijakan*. Working Papper LPEM UI

**Susanti**

*Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara*

Syamsudin Haris, 2005. *Desentralisasi Otonomi Daerah*. LIPI. Jakarta  
Tambunan, T. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*,  
Ghalia Indonesia Jakarta

Tarigan.R, 2004 *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara Jakarta

Todaro MP 1991. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh  
Penerbit Erlangga

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan  
Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Yulianti.E, 2011 *Evaluasi Hasil Pemekaran : Studi Kasus Pemekaran Kabupaten*.  
Tesis. Universitas Indonesia

